

## SAMPAH SEBAGAI MASALAH SOSIAL DI KOTA SINTANG: PERSPEKTIF STRUKTURAL DAN KULTURAL

Markus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,  
Sintang, Indonesia, email: [markusfisip@gmail.com](mailto:markusfisip@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the waste management issue in Sintang City through structural and cultural approaches and identify potential implementable solutions. Using a qualitative method through interviews, focus group discussions, and field observations, this research finds that from a structural perspective, the main challenges faced by Sintang City include the lack of good waste management infrastructure, ineffectively implemented policies, and minimal tripartite coordination between the government, the community, and the private sector. From a cultural perspective, the study reveals that there is still a low level of public knowledge and awareness regarding proper waste management, a culture of excessive consumption of waste-generating products, and persistent littering habits. The findings conclude that the waste problem in Sintang City is not only a technical issue but also a social one that requires a holistic approach. The necessary solutions should involve a combination of adaptive policies, adequate infrastructure development, and efforts to change public behavior through education and community-based programs, such as waste banks and community empowerment initiatives.*

**Keywords:** *waste; social issues; structural and cultural perspectives.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tata kelola sampah di Kota Sintang melalui pendekatan struktural dan kultural, serta mengidentifikasi potensi solusi yang dapat diterapkan. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, diskusi terfokus, dan observasi lapangan, penelitian ini menemukan bahwa dari perspektif struktural, tantangan utama yang dihadapi Kota Sintang yaitu infrastruktur pengelolaan sampah belum memadai, kebijakan yang belum terimplementasikan secara optimal, serta minimnya koordinasi tripartit antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sementara dari perspektif kultural, penelitian menemukan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik, budaya mengkonsumsi produk-produk yang menimbulkan sampah secara berlebihan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan sampah di Kota Sintang bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga isu sosial yang memerlukan pendekatan holistik. Solusi yang diperlukan harus mencakup kombinasi kebijakan yang adaptif, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta perlunya upaya perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan program berbasis komunitas, seperti bank sampah dan pemberdayaan kelompok masyarakat.

**Kata kunci:** sampah; masalah sosial; perspektif struktural dan kultural.

### PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang kompleks di berbagai daerah, termasuk di Kota Sintang. Sebagai

kota yang terus berkembang, Sintang menghadapi tantangan dalam mengelola limbah domestik, industri, dan komersial. Volume sampah yang terus meningkat

setiap harinya mencerminkan pola konsumsi masyarakat yang semakin tinggi, namun tidak diiringi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai.

Menurut penelitian sebelumnya, pengelolaan sampah sering kali melibatkan berbagai dimensi, mulai dari struktural hingga kultural, yang saling memengaruhi dalam proses penyelesaiannya. Masalah struktural dalam pengelolaan sampah umumnya mencakup kurangnya infrastruktur, faktor kebijakan, dan lemahnya koordinasi antara berbagai pihak. Sari et al. (2023) menyoroti bahwa keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), pengangkutan yang tidak merata, serta kebijakan pemerintah yang tidak efektif, menjadi hambatan utama dalam penanganan limbah di daerah perkotaan. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kendala dalam alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk mengelola sampah secara memadai (Nugroho, 2018).

Selain itu, pendekatan top-down dalam kebijakan pengelolaan sampah sering kali tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga implementasinya kurang efektif (Iswanto 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga merupakan isu penting dalam pengelolaan sampah. Ismawati et al. (2023) menekankan perlunya mengubah budaya konsumsi dan gaya hidup masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Studi oleh Setiawan (2017) menyatakan bahwa

rendahnya kesadaran masyarakat untuk memisahkan dan mendaur ulang sampah berkaitan erat dengan minimnya edukasi lingkungan. Budaya konsumsi yang tinggi dan perilaku membuang sampah sembarangan juga menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Menurut Haryanto (2020), perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah membutuhkan proses panjang yang melibatkan edukasi, kampanye publik, dan pemberdayaan komunitas. Praktik-praktik tradisional dan nilai-nilai lokal dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah secara bijak (Resolute, 2024).

Sampah tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga masalah sosial yang mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian oleh Adi (2015) menunjukkan bahwa kawasan dengan tingkat ekonomi rendah cenderung memiliki sistem pengelolaan sampah yang buruk, sehingga masyarakat di daerah tersebut lebih rentan terhadap dampak negatif seperti pencemaran dan masalah kesehatan.

Sampah di perkotaan dapat memicu terjadinya konflik sosial. Masalah ini mencakup ketimpangan dalam pengelolaan sampah, perbedaan akses terhadap layanan kebersihan, serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat miskin (Setiawan 2018). Hal ini nampak ketika akses terhadap layanan kebersihan, termasuk sistem pengangkutan sampah dan fasilitas sanitasi, sangat bervariasi berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga masyarakat. Masyarakat di daerah miskin

perkotaan seringkali tidak memiliki akses ke fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, sehingga mereka lebih rentan terhadap dampak negatif dari penumpukan sampah (Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM 2020).

Dari perspektif ekologi sosial, Setyawati et al. (2023) menekankan bahwa permasalahan sampah harus dilihat sebagai bagian dari interaksi antara manusia, lingkungan, dan struktur sosial. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor struktural dan kultural saling memengaruhi dalam menciptakan permasalahan sampah.

Pendekatan berbasis komunitas sering kali menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi masalah sampah. Studi oleh Pranoto (2019) menunjukkan bahwa inisiatif lokal seperti bank sampah, kelompok daur ulang, dan program edukasi lingkungan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi volume sampah di tingkat lokal.

Model pengelolaan partisipatif ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program pengelolaan sampah dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Menggabungkan persepektif struktural dan kultural dalam mengkaji persoalan sampah di Kota Sintang dapat dijadikan pendekatan yang lebih holistik mengingat persoalan sampah tidak hanya persoalan teknis, namun juga masalah sosial yang kompleks. Dengan menganalisis permasalahan sampah melalui perspektif struktural dan kultural,

diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah, terutama dalam merancang *masterplan* tata kelola sampah yang lebih komprehensif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga untuk menciptakan keselarasan sosial yang lebih baik di Kota Sintang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussions* dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Informan ditentukan secara purposif yang terdiri dari Kepala Dinas, LSM, dan masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif model interaktif (Miles Hubberman dan Saldana 2014). Data kualitatif dianalisa berdasarkan kerangka konseptual dengan menggunakan tahap-tahap analisa data kualitatif secara interaktif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi. Dalam menganalisa data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam, peneliti akan memperhatikan kata-kata, konteks dan konsistensi dari respon-respon yang diberikan oleh para informan. Peneliti melakukan *member check* melalui diskusi dengan para narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah sesuai menurut para informan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Permasalahan Struktural

Kota Sintang merupakan salah satu kota di wilayah timur Kalimantan barat yang tumbuh pesat yang konsekwensi adalah meningkatnya produksi sampah. Dari volume sampah sebanyak kurang lebih 350 ton per hari, yang mampu tertangani hanya kisaran 122 ton per hari dan menyisakan sampah yang tidak tertangani sebanyak 228 ton per hari.

Masalah utama dalam penanganan sampah di Kota Sintang berasal dari keterbatasan infrastruktur dan lemahnya implementasi kebijakan. Kota Sintang hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di KM7 Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian dengan luas 5,5 hektar yang dibangun pada tahun 1993. Penumpukan sampah yang terus meningkat menyebabkan TPA saat ini mendekati over kapasitas. Alat berat yang digunakan berupa *excavator* masih belum memadai baik karena kondisi alat berat maupun jumlahnya. Selain itu, ruas jalan menuju TPA yang rusak mengganggu kelancaran distribusi sampah dari berbagai TPS (Tempat Penampungan Sementara) menuju TPA. Tabel 1.1 menggambarkan keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Sintang.

Tabel 1.1: Infrastruktur Dasar Sampah di Kota Sintang

Infrastruktur	Lokasi	Luas/ Kapasitas	Keterangan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	KM7 Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai	5,5 hektar	TPA ini dibangun pada tahun 1993 dan saat ini hampir

	Tebelian		mencapai kapasitas penuh.
Kontainer Sampah	Beberapa titik di Kota Sintang	14 unit	Kontainer yang ada saat ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah yang optimal
Truk Pengangkut Sampah (Amrol)	Beroperasi di seluruh wilayah Kota Sintang	2 unit	Dari 2 unit yang tersedia, hanya 1 unit yang berfungsi dengan baik. Idealnya, diperlukan 8 unit truk untuk operasional yang optimal
Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R Sungai Durian	Transito City, Kapuas Kanan Hulu dan Jerora	2 unit	TPS 3R bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA

Sumber: Hasil Wawancara, diolah

Anggaran yang terbatas untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dan pengadaan alat pengangkut dan pengolah sampah menjadi kendala signifikan. Alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan operasional. Hal ini menjadi lebih terasa sejak tata kelola sampah tidak lagi sebagai dinas yang mandiri melainkan dijadikan sebagai bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

Sistem pengangkutan sampah yang tersedia juga belum menjangkau seluruh wilayah, terutama di daerah pinggiran kota, sehingga sampah menumpuk di berbagai titik dan mencemari lingkungan sekitar.

Pembuangan sampah sembarangan sering memicu konflik antarwarga, baik karena dampak langsungnya maupun karena persepsi ketidakadilan. Minimnya jumlah dan distribusi tempat sampah di area publik memperburuk pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan sampah masih kurang optimal. Tidak adanya regulasi yang tegas terkait pemisahan sampah, daur ulang, kurangnya pengawasan dan ketiadaan sanksi terhadap pembuangan sampah sembarangan menghambat upaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Belum tercapainya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah menyebabkan kebijakan menjadi kurang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sudah ada namun masih minim. Keterbatasan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengelolaan sampah menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Masalah-masalah di atas menunjukkan perlunya reformasi struktural yang mendalam melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, penguatan implementasi kebijakan, serta koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait.

## **2. Permasalahan Kultural**

Dari sisi kultural, secara umum masyarakat Kota Sintang masih memiliki kesadaran yang relatif rendah terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Hasil wawancara dan FGD

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terbiasa memisahkan sampah organik dan anorganik. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan area terbuka, masih sering terjadi.

Budaya konsumsi yang tinggi tanpa diimbangi dengan pemahaman akan dampaknya terhadap lingkungan menjadi penyebab utama bertambahnya volume sampah. Selain itu, minimnya edukasi lingkungan, baik di tingkat formal (sekolah) maupun nonformal (komunitas), membuat perilaku ramah lingkungan belum menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat.

Masalah sampah di Kota Sintang tidak hanya berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran air dan udara, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Penumpukan sampah di beberapa wilayah menciptakan konflik sosial antara masyarakat, khususnya di daerah yang berdekatan dengan TPS. Bahkan konflik antara masyarakat dan pemerintah juga pernah mencuat dan menjadi pemberitaan nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Sintang. Program seperti bank sampah, pengelolaan limbah organik menjadi kompos, dan kegiatan daur ulang mulai diterapkan di oleh sedikit kelompok sebagai inisiatif lokal. Meski skalanya masih kecil, program-program ini berhasil menstimulasi kesadaran komunitas secara terbatas mengenai

pentingnya pengelolaan sampah yang lebih baik.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam tata kelola sampah. Hasil FDG dan wawancara menekankan perlunya Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan meningkatkan edukasi lingkungan melalui program-program berbasis masyarakat. Sementara itu, masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah maupun dengan mengubah kebiasaan konsumsi atas produk-produk yang menghasilkan limbah dan berhenti membuang sampah sembarangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek struktural dan kultural dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Sintang. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian teknis, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku sosial yang lebih luas.

Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah di Kota Sintang, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah, termasuk pengadaan infrastruktur yang memadai dan memiliki *masterplan* pengelolaan sampah. Selain itu, kebijakan yang lebih tegas dan sistematis mengenai pemisahan sampah, daur ulang, dan

sanksi terhadap pelanggaran perlu dibuat dan diterapkan.

Tidak kalah penting yaitu edukasi lingkungan harus dilakukan secara konsisten di berbagai kalangan, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum. Program berbasis komunitas, seperti bank sampah, perlu diperluas dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Hal ini perlu diperkuat oleh adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2015). *Ketimpangan sosial dan lingkungan dalam pengelolaan sampah perkotaan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Haryanto, T. (2020). *Transformasi perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah: Pendekatan edukasi lingkungan*. Bandung: Alfabeta.
- Ismawati, Y., Septiono, M. A., & Proboretno, N. (2022). *Plastic Waste Management and Burden in Indonesia: Country Situation Report*. International Pollutants Elimination Network (IPEN). Diakses dari [https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-2021-indonesia-v1\\_1aw.pdf](https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-2021-indonesia-v1_1aw.pdf).
- Iswanto, R. (2019). Analisis kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Ekologi Sosial*, 7(2), 45–56.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, A. (2018). *Infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah di perkotaan: Studi*

kasus di Indonesia. *Jurnal Infrastruktur Lingkungan*, 10(1), 21–34.

Pranoto, S. (2019). Pengelolaan sampah berbasis komunitas: Studi kasus program bank sampah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 5(3), 60–74.

Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. (2020). *Peduli Sampah, Peduli Ketimpangan Sosial*. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari [pslh.ugm.ac.id](http://pslh.ugm.ac.id)

Resolute, P. (2024). Applying cultural perspective in Indonesia municipal solid waste management process towards a grounded climate concept and action: A mini-review of opportunities and challenges. *Waste Management & Research*.  
<https://doi.org/10.1177/0734242X241262711>

Setiawan, B. (2017). *Budaya konsumsi dan pengelolaan sampah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

----- (2018). *Manajemen Lingkungan Berbasis Komunitas*. IPB Press.